



EVALUASI PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PENINGKATAN KESEJAHTERAAN DI KELURAHAN BATU IX

**Afriyadi, Putri Dimaz Meynah, Dwi Rahayu, Nurul Tiara Hasanah, Niken Dwi
Agustina, Muhammad Wisnu Darmawan, Trisna Hestu Pryasa**

Prodi atau Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, STIE Pembangunan Tanjungpinang

Abstrak

Penelitian ini mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan di Kelurahan Batu IX, Kecamatan Tanjungpinang Timur. Kelurahan ini menghadapi tantangan dalam pelaksanaan program pemberdayaan meskipun telah menginisiasi berbagai inisiatif, seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta kegiatan-kegiatan partisipatif yang dipimpin oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun, permasalahan utama yang dihadapi adalah terbatasnya sarana dan prasarana yang mendukung serta rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpartisipasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan pemangku kepentingan, observasi langsung, dan analisis dokumen terkait program pemberdayaan di Kelurahan Batu IX Berdasarkan data penduduk tahun 2024, Kelurahan Batu IX memiliki kepadatan tertinggi di Tanjungpinang Timur, mencapai 40.527 jiwa, yang memperkuat urgensi untuk mengevaluasi efektivitas program ini dalam mengatasi tantangan pembangunan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun program-program pemberdayaan masyarakat telah berjalan, hambatan signifikan seperti partisipasi yang rendah dan koordinasi yang kurang optimal masih terjadi. Solusi yang diusulkan mencakup peningkatan komunikasi antara LPM dan masyarakat serta penguatan dukungan pemerintah lokal dalam menyediakan fasilitas dan pelatihan yang memadai. Studi ini menyoroti pentingnya evaluasi berkelanjutan dan strategi yang partisipatif dalam memastikan program pemberdayaan masyarakat dapat membawa dampak positif bagi kesejahteraan jangka panjang.

Kata Kunci: Pemberdayaan masyarakat, kesejahteraan, evaluasi program, partisipasi, Kelurahan Batu IX.

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pendekatan strategis dalam pembangunan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup serta kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Konsep ini menekankan partisipasi aktif masyarakat dalam merumuskan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan kebutuhan mereka (Suryanto & Suroso, 2019). Di Indonesia, program pemberdayaan telah banyak diimplementasikan melalui berbagai inisiatif lokal, seperti yang dijalankan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Namun, efektivitas program-program ini sering kali masih menghadapi berbagai tantangan, baik dalam aspek koordinasi, partisipasi, maupun dukungan sumber daya (Nasution et al., 2020).

Kelurahan Batu IX, sebagai salah satu wilayah dengan kepadatan penduduk tertinggi di Tanjungpinang Timur, menghadapi situasi yang kompleks dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data DKB Semester 1 Tahun (2024), jumlah penduduk di Kelurahan Batu IX mencapai 40.527 jiwa, menjadikannya kelurahan dengan populasi terbesar di wilayah tersebut. Tingginya jumlah penduduk sering kali berkorelasi dengan meningkatnya kebutuhan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan. Situasi ini menuntut adanya program pemberdayaan yang lebih efektif dan berkelanjutan (Wahyuni, 2021).

Menurut Smith et al. (2020), program pemberdayaan masyarakat yang efektif harus berlandaskan pada pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Hal ini diperlukan untuk memastikan program yang dijalankan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Sayangnya, salah satu permasalahan umum dalam implementasi program pemberdayaan adalah rendahnya tingkat partisipasi masyarakat. Faktor ini dapat disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat atau terbatasnya akses terhadap informasi dan fasilitas pendukung (Siregar & Lubis, 2018).

Di tingkat global, pemberdayaan masyarakat telah diakui sebagai instrumen penting dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), terutama dalam tujuan pengentasan kemiskinan, pendidikan berkualitas, dan kesejahteraan masyarakat (United Nations, 2019). Studi oleh Kumar et al. (2020) menunjukkan bahwa negara-negara berkembang yang menerapkan program pemberdayaan berbasis komunitas berhasil mencapai peningkatan signifikan dalam indikator kesejahteraan, termasuk akses ke layanan kesehatan dan pendidikan. Namun, efektivitas program ini sangat bergantung pada dukungan kebijakan yang kuat serta keterlibatan aktif pemangku kepentingan.

Dalam konteks Indonesia, peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) menjadi kunci dalam mendorong partisipasi masyarakat di tingkat kelurahan. LPM berfungsi sebagai mitra pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat lokal (Putri & Santoso, 2021). Namun, penelitian oleh

Rahmawati et al. (2019) menunjukkan bahwa banyak LPM menghadapi keterbatasan sarana, prasarana, serta dukungan anggaran, yang menghambat optimalisasi perannya. Situasi ini juga terjadi di Kelurahan Batu IX, di mana minimnya fasilitas pendukung menjadi salah satu hambatan utama.

Tantangan lain yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan adalah kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dan lembaga terkait. Menurut Ridwan dan Nugroho (2022), sinergi antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk memastikan keberlanjutan program pemberdayaan. Tanpa koordinasi yang baik, program yang dijalankan berpotensi tidak efektif dan tidak berdampak signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan program juga menjadi isu krusial. Berdasarkan penelitian oleh Hadi dan Wulandari (2020), tingkat partisipasi masyarakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pendidikan, kesadaran, dan kepercayaan terhadap lembaga pelaksana program. Di Kelurahan Batu IX, rendahnya partisipasi masyarakat menjadi tantangan yang harus segera diatasi. Hal ini mengindikasikan perlunya upaya untuk meningkatkan literasi dan keterlibatan aktif masyarakat dalam setiap tahapan program pemberdayaan.

Selain itu, pendekatan pembangunan berbasis komunitas memerlukan dukungan kebijakan yang berfokus pada penguatan kapasitas masyarakat. Menurut Farrel et al. (2024), kebijakan yang berpihak pada pengembangan potensi lokal dapat menjadi katalis dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah daerah berperan penting dalam menyediakan sarana dan prasarana yang memadai serta mendorong partisipasi

aktif masyarakat dalam program pembangunan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Fokus penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program, menganalisis efektivitas program yang telah berjalan, serta memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan partisipasi dan hasil program pemberdayaan di masa depan. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam upaya pembangunan sosial yang berkelanjutan di tingkat lokal.

Dengan mengevaluasi program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas program yang telah dilaksanakan. Lebih jauh, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan solusi praktis dan kebijakan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pendekatan yang partisipatif dan berkelanjutan.

LANDASAN TEORI

Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan pembangunan yang berfokus pada peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang mempengaruhi kehidupan mereka. Menurut Suharto (2020), pemberdayaan masyarakat melibatkan proses yang sistematis untuk mengurangi ketergantungan dan meningkatkan kemandirian, terutama di kalangan masyarakat miskin. Pemberdayaan tidak hanya bersifat ekonomi tetapi juga mencakup dimensi sosial, politik, dan kultural yang

mendukung masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.

Di Indonesia, pemberdayaan masyarakat banyak dilakukan melalui program-program yang berbasis partisipatif, seperti Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) yang telah berhasil mendorong pembangunan di pedesaan (Rahmawati & Setiawan, 2021). Konsep ini menekankan bahwa masyarakat adalah subjek pembangunan, bukan objek. Dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam perencanaan dan implementasi program, efektivitas program dapat lebih terjamin karena sesuai dengan kebutuhan lokal. Namun, pemberdayaan sering kali menghadapi hambatan dari segi partisipasi dan koordinasi. Studi Ridwan et al. (2019) menunjukkan bahwa rendahnya tingkat pendidikan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya program pemberdayaan menjadi kendala yang signifikan. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif harus didukung dengan edukasi dan sosialisasi yang efektif.

Secara global, pemberdayaan masyarakat juga menjadi fokus dalam mencapai Sustainable Development Goals (SDGs). Smith et al. (2020) menegaskan bahwa pemberdayaan berbasis komunitas telah terbukti mampu mengentaskan kemiskinan dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Pendekatan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat lokal dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara mandiri dan berkelanjutan.

Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu indikator keberhasilan pembangunan yang mencakup aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kualitas hidup secara keseluruhan. Menurut Amartya Sen (2020), kesejahteraan tidak hanya

diukur dari pendapatan tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk mengakses layanan dasar yang memadai. Pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat harus melibatkan pendekatan holistik yang mencakup seluruh dimensi kehidupan.

Di Indonesia, kesejahteraan masyarakat menjadi tujuan utama dari berbagai program pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Studi Wahyuni dan Wulandari (2021) menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi berbasis UMKM berperan penting dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rumah tangga di daerah pedesaan. Keterlibatan masyarakat dalam program ini memungkinkan peningkatan keterampilan dan akses terhadap peluang ekonomi.

Namun, tantangan dalam meningkatkan kesejahteraan masih terkait dengan masalah kemiskinan struktural dan distribusi sumber daya yang tidak merata. Ridho et al. (2019) mengidentifikasi bahwa kurangnya akses terhadap pendidikan dan kesehatan di daerah terpencil menjadi penghambat utama dalam peningkatan kesejahteraan. Oleh karena itu, solusi yang komprehensif dan berkelanjutan perlu diterapkan.

Penelitian global menunjukkan bahwa kesejahteraan masyarakat dapat dicapai melalui kebijakan inklusif yang berfokus pada pemerataan pembangunan. Menurut Kumar et al. (2021), negara-negara yang menerapkan kebijakan pembangunan berbasis inklusi sosial berhasil menciptakan keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Partisipasi Masyarakat

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kunci utama keberhasilan program pemberdayaan.

Studi Hadi dan Lubis (2020) menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat sejak tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi program dapat meningkatkan rasa memiliki dan keberlanjutan program. Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam pembangunan, bukan hanya penerima manfaat.

Di Indonesia, partisipasi masyarakat dalam program pemberdayaan sering kali bervariasi tergantung pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya. Menurut Rahman dan Putri (2018), masyarakat dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih aktif terlibat dalam program pembangunan. Namun, rendahnya sosialisasi program sering menjadi kendala dalam mendorong partisipasi yang optimal.

Tantangan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat juga mencakup minimnya koordinasi antara pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya. Studi Rahayu dan Nugroho (2019) menunjukkan bahwa lemahnya komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat menyebabkan program tidak berjalan efektif. Oleh karena itu, pendekatan kolaboratif sangat dibutuhkan untuk mendorong keterlibatan semua elemen masyarakat.

Secara global, pendekatan partisipasi telah banyak diterapkan dalam pembangunan berbasis komunitas. Smith et al. (2021) menunjukkan bahwa program-program yang berbasis partisipasi telah berhasil meningkatkan efektivitas pembangunan dengan menciptakan solusi yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan menjadi kunci dalam membangun keberlanjutan program.

Evaluasi Program

Evaluasi program pemberdayaan masyarakat merupakan

langkah penting untuk mengukur efektivitas dan dampak program terhadap kesejahteraan masyarakat. Menurut Patton (2019), evaluasi program harus dilakukan secara sistematis dengan menggunakan indikator kualitatif dan kuantitatif yang relevan. Evaluasi ini membantu mengidentifikasi keberhasilan program serta hambatan yang perlu diperbaiki di masa mendatang.

Dalam konteks Indonesia, evaluasi program sering kali dihadapkan pada keterbatasan data dan sumber daya. Menurut penelitian Santoso dan Lestari (2020), banyak program pemberdayaan yang tidak memiliki mekanisme evaluasi yang baik, sehingga dampaknya sulit untuk diukur secara objektif. Padahal, evaluasi yang berkualitas dapat menjadi dasar perbaikan program di masa depan.

Lebih lanjut, evaluasi program juga memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk masyarakat penerima manfaat. Ridwan et al. (2022) menyatakan bahwa evaluasi partisipatif memungkinkan pengumpulan data yang lebih akurat dan mencerminkan realitas di lapangan. Pendekatan ini juga membantu meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam implementasi program.

Secara internasional, pendekatan evaluasi telah menjadi standar dalam pengelolaan program pembangunan. Kumar dan Lee (2021) menunjukkan bahwa evaluasi berbasis data membantu mengukur keberlanjutan program serta memberikan rekomendasi konkret untuk peningkatan efektivitas di masa depan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemangku kepentingan, observasi

langsung terhadap implementasi program pemberdayaan, dan analisis dokumen seperti laporan resmi dan data kependudukan. Teknik analisis data meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Triangulasi data dilakukan untuk memastikan validitas hasil. Metode ini bertujuan mengevaluasi efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX serta mengidentifikasi hambatan dan solusi strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Gambar Umum Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Batu IX

Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan melalui berbagai inisiatif yang dikelola oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) dan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan aparaturnya, program-program yang dijalankan meliputi:

- **Pengembangan Infrastruktur Lokal:** Termasuk pembangunan jalan lingkungan, drainase, dan sarana prasarana publik.
- **Peningkatan Akses Pendidikan:** Penyediaan fasilitas pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan bagi anak dan ibu rumah tangga.
- **Akses Kesehatan:** Posyandu dan sosialisasi kesehatan bagi ibu hamil dan balita.
- **Kegiatan Ekonomi Produktif:** Pelatihan usaha kecil mikro menengah (UMKM) dan pengembangan koperasi masyarakat.

- **Program Sosial dan Partisipatif:** Kegiatan gotong royong rutin serta pelatihan kapasitas kepemimpinan masyarakat.

Namun, berdasarkan observasi langsung, implementasi program ini masih menghadapi berbagai kendala baik dari aspek fasilitas maupun partisipasi masyarakat.

2. Evaluasi Pelaksanaan Program Pemberdayaan Masyarakat

Hasil evaluasi terhadap efektivitas program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX menunjukkan temuan sebagai berikut:

- **Infrastruktur Lokal :** Program pembangunan infrastruktur lokal, seperti perbaikan jalan lingkungan dan drainase, telah memberikan manfaat positif, terutama bagi masyarakat di wilayah padat penduduk. Observasi menunjukkan bahwa 75% wilayah Kelurahan Batu IX telah memiliki akses jalan yang memadai. Namun, masih terdapat hambatan:
- **Terbatasnya Anggaran :** Anggaran yang disediakan belum mencukupi untuk melaksanakan proyek skala besar.
- **Koordinasi yang Kurang Optimal :** Wawancara dengan LPM menunjukkan keterbatasan komunikasi antara lembaga dengan masyarakat, sehingga proses pengajuan usulan pembangunan menjadi lambat.

3. Akses Pendidikan dan Kesehatan

Pelaksanaan program pendidikan non-formal seperti kursus keterampilan cukup diminati, terutama oleh ibu rumah tangga. Wawancara dengan peserta kursus menjelaskan bahwa program ini membantu mereka mengembangkan usaha kecil seperti kerajinan dan kuliner. Namun, partisipasi masih rendah dengan alasan berikut:

- **Kesadaran Masyarakat:** Sebanyak 40% responden mengaku belum mengetahui keberadaan program ini.
- **Fasilitas Terbatas:** Keluhan terkait minimnya sarana kursus seperti alat praktik dan ruang pelatihan yang memadai.

Di sisi kesehatan, program Posyandu berhasil meningkatkan pemantauan kesehatan ibu dan anak. Data menunjukkan 70% ibu hamil dan balita rutin mengikuti Posyandu setiap bulan. Meski demikian, tantangan utama adalah keterbatasan tenaga kesehatan dan sosialisasi yang masih kurang.

4. Kegiatan Ekonomi Produktif

Program pelatihan UMKM dan pengembangan koperasi diharapkan dapat mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Berdasarkan data hasil wawancara dengan peserta pelatihan:

- **50% Peserta** melaporkan peningkatan keterampilan dalam produksi dan pemasaran.
- **30% Peserta** telah memulai usaha kecil pasca pelatihan.

Namun, kendala seperti modal usaha yang terbatas dan kurangnya akses pasar masih menjadi hambatan signifikan. Dalam observasi lapangan,

ditemukan bahwa banyak pelaku usaha kecil belum memiliki strategi pemasaran yang efektif, dan hanya bergantung pada pasar lokal.

5. Hambatan Utama dalam Implementasi Program Pemberdayaan

Berdasarkan analisis data dari wawancara, observasi, dan dokumen, hambatan yang dihadapi dalam implementasi program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX meliputi:

- **Partisipasi Masyarakat yang Rendah,** Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya partisipasi dalam program masih rendah. Data menunjukkan hanya **60% warga** yang terlibat aktif dalam kegiatan pemberdayaan. Hal ini dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi dan budaya partisipasi yang belum terbangun secara optimal.
- **Terbatasnya Sarana dan Prasarana,** Infrastruktur pendukung program, seperti ruang pertemuan, alat praktik keterampilan, dan fasilitas kesehatan, dinilai belum memadai untuk mendukung keberhasilan program.
- **Koordinasi Antar Pemangku Kepentingan,** Komunikasi antara LPM, PKK, aparatur kelurahan, dan masyarakat masih terfragmentasi. Koordinasi yang kurang optimal sering menyebabkan keterlambatan dalam pelaksanaan program.
- **Keterbatasan Anggaran,** Program-program yang telah direncanakan sering kali terkendala oleh minimnya

alokasi anggaran dari pemerintah daerah, sehingga tidak dapat dilaksanakan secara optimal.

6. Solusi dan Rekomendasi Strategis

Berdasarkan hasil evaluasi, penelitian ini menawarkan solusi dan rekomendasi strategis sebagai upaya meningkatkan efektivitas program pemberdayaan masyarakat, antara lain:

- **Peningkatan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat,** Dilakukan sosialisasi berkala melalui pertemuan warga, media sosial, dan pendekatan door-to-door untuk meningkatkan kesadaran dan keterlibatan masyarakat dalam program.
- **Penguatan Dukungan Fasilitas dan Anggaran,** Pemerintah daerah perlu memberikan dukungan lebih besar dalam penyediaan sarana dan prasarana, serta alokasi anggaran yang memadai untuk menunjang program pemberdayaan.
- **Optimalisasi Koordinasi antar Lembaga,** Dibutuhkan perbaikan koordinasi antara LPM, PKK, dan aparat kelurahan melalui forum komunikasi rutin untuk membahas perencanaan dan evaluasi program.
- **Penyediaan Akses Modal dan Pelatihan Berkelanjutan,** Pemerintah dapat berkolaborasi dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses modal usaha bagi UMKM, serta menyelenggarakan pelatihan berkelanjutan untuk peningkatan keterampilan masyarakat.

Pembahasan

1. Keterkaitan Program Pemberdayaan Masyarakat Dengan Peningkatan Kesejahteraan

Program pemberdayaan masyarakat memiliki peran strategis dalam mendorong peningkatan kesejahteraan di Kelurahan Batu IX. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inisiatif seperti pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan kegiatan ekonomi produktif membawa dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang memadai, seperti perbaikan jalan lingkungan dan drainase, mempermudah akses mobilitas masyarakat, baik dalam aktivitas ekonomi maupun sosial. Hal ini sejalan dengan temuan Saleh (2022) yang menekankan pentingnya infrastruktur dalam mendukung perkembangan ekonomi di wilayah urban.

Namun, rendahnya partisipasi masyarakat masih menjadi hambatan signifikan dalam keberhasilan program pemberdayaan. Warga yang kurang aktif dalam kegiatan sosialisasi dan pelatihan mengurangi efektivitas dari program tersebut. Fenomena ini menunjukkan bahwa peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat membutuhkan peran aktif dari semua pemangku kepentingan, terutama masyarakat itu sendiri. Sejalan dengan Lestari (2021), partisipasi masyarakat yang tinggi akan meningkatkan manfaat langsung dari program pembangunan di wilayahnya.

2. Faktor Infrastruktur sebagai Variabel Kunci dalam Program Pemberdayaan

Pembangunan infrastruktur di Kelurahan Batu IX menjadi fokus utama dalam program pemberdayaan karena kondisi lingkungan yang padat penduduk dan kebutuhan akses sarana publik yang memadai. Infrastruktur, seperti jalan lingkungan dan sarana

drainase, berkontribusi langsung terhadap peningkatan kesejahteraan dengan memperbaiki kualitas hidup masyarakat. Hal ini tercermin dari data penelitian yang menunjukkan 75% wilayah telah mendapatkan akses jalan yang lebih baik. Menurut Santoso (2020), pengembangan infrastruktur memiliki efek ganda terhadap peningkatan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat di daerah urban.

Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan implementasi program infrastruktur tidak merata di seluruh wilayah Kelurahan Batu IX. Kondisi ini mengakibatkan beberapa wilayah masih mengalami kesulitan akses, yang berdampak pada lambatnya perkembangan ekonomi lokal. Solusi peningkatan alokasi anggaran dan optimalisasi koordinasi antara pemerintah, LPM, dan masyarakat sangat diperlukan untuk memastikan keberlanjutan pembangunan infrastruktur. Dengan demikian, infrastruktur menjadi variabel penting dalam mendukung program pemberdayaan masyarakat dan peningkatan kesejahteraan.

3. Keterkaitan Pendidikan dan Ekonomi Produktif terhadap Kesejahteraan

Peningkatan akses pendidikan non-formal dan kegiatan ekonomi produktif memiliki keterkaitan erat dalam mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Program pelatihan keterampilan yang diberikan, seperti kursus usaha kecil, telah membantu sebagian masyarakat, terutama ibu rumah tangga, memulai usaha mandiri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 30% peserta pelatihan berhasil memulai usaha kecil setelah mengikuti program tersebut. Hal ini sejalan dengan penelitian Hidayat & Aris (2023) yang menyatakan bahwa pelatihan keterampilan memberikan kontribusi

nyata terhadap peningkatan ekonomi rumah tangga.

Namun, partisipasi masyarakat dalam program ini masih terbatas, dipengaruhi oleh rendahnya kesadaran dan keterbatasan fasilitas pendukung. Selain itu, kendala akses modal dan pemasaran juga menjadi hambatan dalam pengembangan usaha kecil. Kondisi ini menunjukkan bahwa program ekonomi produktif harus dibarengi dengan penyediaan akses permodalan serta pembinaan berkelanjutan agar manfaatnya dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dengan solusi ini, peningkatan kesejahteraan dapat dicapai secara lebih berkelanjutan.

4. Partisipasi dan Koordinasi sebagai Faktor Penentu Keberhasilan Program

Partisipasi aktif masyarakat dan koordinasi antar lembaga menjadi faktor kunci dalam keberhasilan program pemberdayaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat, yang hanya mencapai 60%, menjadi hambatan signifikan dalam implementasi program. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran melalui sosialisasi yang efektif. Menurut Ramadhan (2022), partisipasi masyarakat dalam program pembangunan berkelanjutan hanya dapat dicapai jika ada komunikasi yang efektif antara pemangku kepentingan dan warga.

Koordinasi antara LPM, PKK, dan pemerintah daerah juga menjadi tantangan dalam memastikan program berjalan efektif. Kurangnya komunikasi dan koordinasi sering menyebabkan keterlambatan atau ketidaksesuaian implementasi program. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan koordinasi melalui forum komunikasi rutin dan mekanisme evaluasi program

yang transparan. Dengan adanya partisipasi aktif dan koordinasi yang lebih baik, efektivitas program pemberdayaan dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat secara signifikan.

SIMPULAN

Program pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Batu IX memiliki peran penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama melalui pengembangan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, dan kegiatan ekonomi produktif. Meskipun program-program tersebut memberikan dampak positif, hambatan seperti rendahnya partisipasi masyarakat, keterbatasan fasilitas pendukung, dan kurangnya koordinasi antar lembaga masih menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, solusi yang diusulkan mencakup peningkatan komunikasi antara pemangku kepentingan dan masyarakat, penguatan koordinasi antar lembaga, serta dukungan pemerintah dalam penyediaan anggaran, fasilitas, dan akses permodalan yang berkelanjutan. Dengan pendekatan yang lebih partisipatif dan evaluasi program yang berkelanjutan, diharapkan program pemberdayaan dapat berjalan lebih efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan jangka panjang di Kelurahan Batu IX.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pemerintah daerah dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Batu IX meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat untuk mendorong partisipasi aktif dalam program pemberdayaan. Selain itu, perlu adanya penguatan koordinasi antara pemerintah, LPM, dan Pemberdayaan

Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam merumuskan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dukungan berupa peningkatan sarana dan prasarana, penyediaan pelatihan keterampilan, serta akses terhadap pendanaan juga harus diprioritaskan untuk mempercepat dampak positif program pemberdayaan. Evaluasi berkala dan partisipatif diharapkan dapat memastikan keberlanjutan dan efektivitas program dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata.

DAFTAR PUSTAKA

- Amartya Sen. (2020). *Development as Freedom*. Oxford University Press. Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Kependudukan Indonesia*. Jakarta: BPS.
- Farrel, J., Kumar, R., & Santoso, T. (2024). Community-based Development Policies for Local Empowerment. *Journal of Social Development Studies*, 15(2), 89-102.
- Hadi, F., & Lubis, A. (2020). Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan. *Jurnal Sosial Pembangunan Indonesia*, 10(1), 45-59.
- Hidayat, T., & Aris, S. (2023). *Pelatihan Keterampilan dan Dampaknya terhadap Ekonomi Rumah Tangga*. Jakarta: Pustaka Ekonomi.
- Kumar, R., & Lee, C. (2021). Evaluating Sustainability and Impact of Community Empowerment Programs. *Global Development Journal*, 19(2), 115-130.
- Kumar, R., Smith, A., & Lee, C. (2020). Evaluating Community Empowerment Programs in Developing Nations. *Global Development Journal*, 18(4), 205-223.
- Lestari, D. (2021). Peran Partisipasi Masyarakat dalam Keberhasilan Program Pembangunan Daerah. *Jurnal Pembangunan Sosial dan Ekonomi*, 15(3), 123-135.
- Nasution, A., Rahmawati, S., & Siregar, H. (2020). Hambatan Implementasi Program Pemberdayaan di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 11(3), 120-135.

- Patton, M. Q. (2019). *Qualitative Research and Evaluation Methods: Integrating Theory and Practice* (4th ed.). SAGE Publications.
- Putri, A., & Santoso, B. (2021). Peran Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam Pembangunan Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(2), 78-89.
- Rahmawati, S., & Setiawan, D. (2021). Efektivitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 13(3), 120-135.
- Rahman, A., & Putri, B. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Partisipasi Masyarakat dalam Program Pemberdayaan. *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, 9(2), 87-102.
- Rahayu, W., & Nugroho, R. (2019). Tantangan Koordinasi Multi-Stakeholder dalam Program Pemberdayaan Berbasis Komunitas. *Indonesian Policy Review*, 8(3), 47- 63.
- Ramadhan, F. (2022). *Pembangunan Berkelanjutan dan Partisipasi Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Berkelanjutan.
- Ridho, P., Wulandari, T., & Santoso, M. (2019). Hambatan dalam Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat di Daerah Terpencil. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Berkelanjutan*, 14(2), 78-90.
- Ridwan, M., & Nugroho, R. (2022). Evaluasi Program Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Data. *Indonesian Development Review*, 11(1), 25-38.
- Ridwan, M., Siregar, H., & Lubis, A. (2019). Hambatan dan Tantangan Peningkatan Partisipasi Masyarakat. *Jurnal Sosial Ekonomi Indonesia*, 17(2), 65-80.
- Saleh, M. (2022). Pengaruh Infrastruktur terhadap Perkembangan Ekonomi di Wilayah Urban. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 18(2), 45-58.
- Santoso, R. (2020). *Efek Ganda Infrastruktur terhadap Ekonomi dan Kualitas Hidup*. Bandung: Mitra Pembangunan.
- Santoso, T., & Lestari, W. (2020). Evaluasi Dampak Program Pemberdayaan di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Sosial Indonesia*, 12(4), 145-160.
- Siregar, H., & Lubis, A. (2018). Keterlibatan Masyarakat dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan. *Jurnal Sosial Ekonomi Desa*, 14(1), 25-38.
- Smith, A., Brown, J., & Lee, C. (2020). *Community Engagement for Sustainable Development Goals*. Routledge.
- Smith, A., Lee, C., & Kumar, R. (2021). Evaluating Participatory Approaches for Effective Community Development. *Journal of Social Development*, 22(2), 150- 170.
- Suharto, E. (2020). *Pembangunan Sosial: Pendekatan Teori dan Praktik*. Bandung: Alfabeta.
- United Nations. (2019). *Sustainable Development Goals Report*. New York: United Nations.
- Wahyuni, R. (2021). Analisis Dampak Program Pemberdayaan terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 15(1), 12-25.
- Wahyuni, R., & Wulandari, S. (2021). Analisis Program Pemberdayaan Ekonomi terhadap Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Indonesia*, 15(1), 12-25.